

LAPORAN PENELITIAN

11-10-9

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
KEBERADAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
(STUDI KASUS DI KABUPATEN TANAH DATAR)**



MILIK PERPUSTAKAAN IKIP PADANG

DITERIMA TGL	16-12-94
SUMBER/HARGA	hx
KOLEKSI	KRI
NO INVENTARIS	1891/h/94-P.12
ASPEK KASUS	332.1072 alh pr

Oleh

Drs. Zul Azhar
(Ketua Tim Peneliti)

Penelitian ini dibiayai oleh:
Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas IKIP Padang
Tahun Anggaran 1993/1994
Surat Perjanjian Kerja No. : 102/PT37.H9/N./1993
Tanggal 1 Juli 1993

**INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG
1994**

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

Laporan Penelitian

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBERADAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (STUDI KASUS DI KABUPATEN TANAH DATAR)

PERSONALIA

1. Ketua Peneliti : Drs. Zul Azhar
2. Anggota Peneliti : Drs. I d r i s
Drs. Hasdi Aimon

LEMBARAN PERSETUJUAN KONSULTAN PENELITIAN

DR. AGUS IRIANTO
(Nama)



.....
(Tanda Tangan)

Padang, Januari 1994

PENGANTAR

Penelitian merupakan salah satu karya ilmiah di perguruan tinggi. Karya ilmiah ini harus dilaksanakan oleh Dosen IKIP Padang dalam rangka meningkatkan mutu, baik sebagai dosen maupun sebagai peneliti.

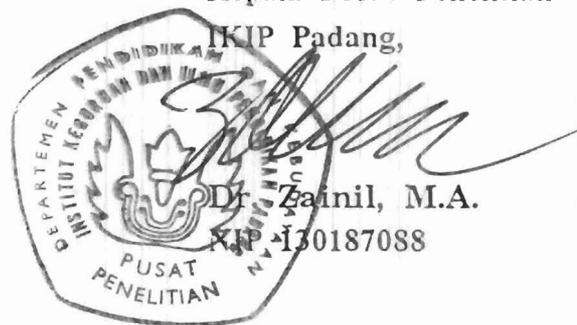
Oleh karena itu, Pusat Penelitian IKIP Padang berusaha mendorong dosen/peneliti untuk melakukan penelitian sebagai bagian dari kegiatan akademiknya. Dengan demikian mutu dosen/peneliti dan hasil penelitiannya dapat ditingkatkan.

Akhirnya saya merasa gembira bahwa Penelitian ini telah diselesaikan oleh peneliti dengan melalui proses pemeriksaan dari Tim Penilai Usul dan Laporan Penelitian Puslit IKIP Padang.

Padang, Februari 1994

Kepala Pusat Penelitian

IKIP Padang,



DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
ABSTRAK	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah dan Pembatasan Masalah....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II. KERANGKA TEORITIS DAN PENGAJUAN HIPOTESIS	
A. Deskriptis Teoritis	7
B. Kerangka Berfikir	11
C. Perumusan Hipotesis	12
D. Asumsi	12
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Sistem Pendekatan dan Areal Penelitian	13
B. Populasi dan Sampel	13
C. Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data .	14
D. Analisis Data	15
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data	16
B. Pengujian Hipotesis	17
C. Pembahasan	20
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	23
B. Saran Penelitian	26
DAFTAR BACAAN	27

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	1. Surat Ijin Penelitian	27
LAMPIRAN	2. Instrumen Penelitian	30
LAMPIRAN	3. Hasil Analisis Data	34

A B S T R A K

Penelitian ini merupakan suatu pengkajian beberapa pandangan, pendapat dan persepsi masyarakat terhadap keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Lumbung Piti Nagari (LPN) di wilayah Pedesaan Kabupaten Tanah Datar.

Persepsi yang dilihat terhadap keberadaan BPR ini menyangkut masalah manfaat yang dirasakan masyarakat, inovasi pembaharuan dan perubahan perilaku sosial masyarakat serta komitmen masyarakat dalam menerima kehadiran bank di desa. Jadi permasalahan yang ingin dipecahkan menyangkut persepsi terhadap keberadaan BPR ditinjau dari status pekerjaan dan sosial masyarakatnya.

Penelitian ini mengkaji sembilan BPR/LPN yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar. Studi dilaksanakan dengan pendekatan kuantitatif yaitu dengan mempergunakan analisis statistik ANOVA (Analysis of Variance). Data dikumpulkan dengan teknik kuesioner kepada 104 responden yang masing-masing terdiri dari; (1) masyarakat pegawai yang berstatus pemuka masyarakat 27 orang, (2) masyarakat swasta yang berstatus pemuka masyarakat 27 orang, (3) masyarakat pegawai yang berstatus masyarakat biasa 27 orang dan (4) masyarakat swasta yang berstatus masyarakat biasa 27 orang. Teknik pengambilan sampel yang dipakai adalah teknik sampling dua tahap (two stage sampling).

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama : Dari analisis deskripsi data persepsi masyarakat pegawai yang berstatus pemuka masyarakat memberikan persepsi yang sangat setuju dan sangat mendukung atas keberadaan BPR/LPN di pedesaan. Berikutnya persepsi masyarakat pegawai yang berstatus masyarakat biasa juga memberikan persepsi yang sangat setuju dan sangat mendorong. Sedangkan persepsi masyarakat swasta yang berstatus pemuka masyarakat, memberikan persepsi yang setuju atau agak ragu-ragu bila dibandingkan dengan masyarakat swasta yang berstatus masyarakat biasa atau anggota masyarakat.

Kedua : Uji hipotesis menunjukkan adanya (1) perbedaan yang berarti antara persepsi masyarakat pegawai dengan masyarakat swasta terhadap keberadaan BPR/LPN (2) perbedaan yang berarti positif antara persepsi pemuka masyarakat dengan masyarakat biasa terhadap keberadaan BPR/LPN.

(3) terdapat interaksi yang berarti positif antara pekerjaan dengan status kedudukan di masyarakat.

Di sini akan jelas Peran Pemuka masyarakat (tungku tigo sejarangan), dalam memberikan persepsinya. Karena dalam hal ini peran tungku tigo sejarangan ini memang merupakan "LANTERA" untuk penunjuk jalan bagi masyarakat, kalau lantera yang telah padam atau tidak nyala lagi tentu jalan bagi masyarakat tidak tampak. Akhirnya keberadaan BPR/LPN di pedesaan akan tersendat-sendat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia pada Repelita V dan IV sekarang banyak diarahkan kepada pembangunan masyarakat di pedesaan. Pembangunan masyarakat itu antara lain peningkatan kesehatan masyarakat desa, perbaikan lingkungan kampung, pembinaan industri kecil pedesaan, perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat pedesaan. Hal ini dimungkinkan karena sekitar 81,20% penduduk Indonesia tinggal di pedesaan (Simanjuntak, 1986: 153). Di samping itu bahagian terbesar dari wilayah Indonesia merupakan daerah pedesaan yang memiliki berbagai macam potensi alamiah yang perlu dibina dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut, pemerintah melalui departemen-departemen telah membentuk berbagai macam bentuk badan usaha baik yang bersifat pemerintahan maupun swasta. Badan usaha yang dibentuk itu berupa Koperasi, Perusahaan Daerah maupun berbentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Bank Perkreditan Rakyat didirikan berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 1988, yang menyatakan bahwa guna untuk memenuhi kebutuhan

pelayanan akan jasa-jasa perbankan dan untuk lebih menunjang kegiatan perekonomian masyarakat pada umumnya, dipandang perlu menyediakan pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat pedesaan. Bank desa, Lumbung Piti Nagari (LPN), bank pasar, bank pegawai dan bank lainnya dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan adalah Bank Perkreditan Rakyat. Untuk itu BPR didirikan dan menjalankan usaha di kecamatan dan di desa di luar ibu kota negara, ibu kota daerah tingkat I (DATI I) dan ibu kota daerah tingkat II (DATI II). Lembaga-lembaga Perbankan yang dibentuk pada tingkat desa itu diharapkan oleh pemerintah menjadi alat untuk mengadakan berbagai pembaharuan (modernisasi) pada masyarakat desa.

Dari sekian banyak lembaga perbankan tersebut yang dibentuk pemerintah, yang terbesar dan terpenting adalah BPR. Faktanya istilah BPR secara resmi dipakai dalam Kepres No. 38/1988, dan modal yang disetor dalam pendirian BPR sekurang-kurangnya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Modal BPR dapat berupa hasil Gebu Minang (Gerakkan Seribu Minang) dan sponsor pribadi, tetapi yang banyak adalah perkembangan dan perubahan dari LPN lama menjadi BPR, sehingga dikenal adalah BPR/LPN.

BPR berusaha menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan serta untuk mengurangi praktek-praktek ijon dan para pelepas utang. Usaha ini dilaksanakan melalui :

- a). Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan.
- b). Pemberian kredit bagi pengusaha kecil dan masyarakat pedesaan.

Anggota dari BPR salah satu di daerah Sumatera Barat disponsori oleh Gebu Minang dan para perantau urang awak Minangkabau serta warga masyarakat Minang sendiri yang ada di Ranah Minang. Mereka menjadi anggota secara otomatis dan diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dan kreatif dalam mengujudkan program-program pembangunan yang disalurkan melalui BPR ini.

Tugas BPR diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan serta untuk mengurangi praktek-praktek ijon dan para pelepas uang.

Usaha dari BPR adalah Untuk :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan
- b. Memberikan kredit bagi pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan.
- c. Menjadi penyalur program-program dari pemerintah ke masyarakat dan menjadi wadah yang menampung semua aktivitas yang berasal dari masyarakat desa itu sendiri.
- d. Sebagai sarana untuk menggerakkan dan mendorong perubahan prilaku masyarakat dalam bidang perekonomian.

- e. Meningkatkan pengetahuan dan pembangunan pedesaan
- f. Untuk sebagai lembaga komunikasi antara berbagai pihak dalam masyarakat.
- g. Sebagai pembimbing dan penyuluh berbagai contoh modernisasi yang dilakukan.
- h. Mendidik dan mengajar masyarakat dalam hidup hemat dan ekonomis melalui menabung di BPR.

Selanjutnya keberhasilan dari lembaga-lembaga Bank Perkreditan Rakyat di pedesaan dalam melakukan usaha, banyak ditentukan oleh pemuka masyarakat. Pemuka masyarakat yaitu Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik pandai dalam Nagari yang biasa disebut peranan tungku tigo sejarangan.

Hal ini dikatakan bahwa peranan tungku tigo sejarangan di ranah Minang masih berurat berakar dalam kebudayaannya. Apalagi masalah yang berhubungan dengan masalah pemberian kredit yang memakai bunga. Bunga bank di suatu desa dianggap masih sebagai riba oleh sebagian masyarakat orang Minang. Untuk menghilangkan dan menjelaskan pengertian bunga Bank pada masyarakat sangat berpengaruh sekali peranan tungku tigo sejarangan ini.

Selanjutnya dengan adanya penyuluhan-penyuluhan dan keterangan-keterangan serta contoh-contoh yang diberikan pada masyarakat pedesaan oleh Tungku Tigo Sejarangan akan membawa pengaruh besar terhadap kehadiran Bank Perkreditan Rakyat di Pedesaan.

Kemudian daripada itu lancarnya pengembalian kredit

oleh masyarakat pada BPR mempunyai hubungan dengan manfaat kredit yang diberikan pada masyarakat dalam hal pembangunan Pedesaan. Akhirnya peranan tungku tigo sejarangan ini apakah memang berpengaruh terhadap keberadaan BPR/LPN di pedesaan. Akhirnya bagaimana persepsi masyarakat pegawai, dan persepsi masyarakat swasta terhadap keberadaan BPR/LPN di pedesaan, serta apakah ada pengaruh status sosial masyarakat dalam menerima kehadiran bank di desa.

B. Perumusan Masalah dan Pembatasan Masalah

Berangkat dari masalah-masalah di atas, barangkali sudah cukup jelas yang menjadi motivasi keberadaan penelitian ini. Namun demikian seperti yang telah dikemukakan pada bagian latar belakang, di mana penelitian ini lebih memfokuskan pada masalah Persepsi warga masyarakat terhadap keberadaan BPR di pedesaan. Dan secara eksplisit masalah penelitian dapat diungkapkan dalam rumusan-rumusan masalah seperti berikut ini:

1. Apakah ada perbedaan persepsi terhadap keberadaan BPR antara masyarakat Pegawai dengan masyarakat swasta, di Kabupaten Tanah Datar.
2. Apakah ada perbedaan persepsi terhadap keberadaan BPR antara Pemuka Masyarakat dengan Masyarakat Biasa, di Kabupaten Tanah Datar.
3. Apakah ada interaksi antara pekerjaan dengan status dalam masyarakat, pada studi persepsi terhadap BPR di Kabupaten Tanah Datar.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (a) apakah memang ada perbedaan persepsi masyarakat pegawai dengan masyarakat biasa terhadap keberadaan BPR/LPN di pedesaan, (b) melihat adakah perbedaan persepsi pemuka masyarakat dengan masyarakat biasa, (c) serta apakah ada intraksi antara pekerjaan dengan status sosial masyarakat dalam menerima kehadiran bank di pedesaan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pemerintah daerah Sumatera Barat yang sedang membenahi perkembangan kemajuan masyarakat di Pedesaan. Hasil penelitian ini juga akan dapat digunakan sebagai input dalam merencanakan pengembangan BPR bagi Donator dan pendiri BPR seperti Anggota GEBU Minang dan sebagainya.

BAB II
KERANGKA TEORITIS
DAN
PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Deskriptis Teoritis

1. Persepsi

Pengertian persepsi banyak dikupas para ahli antara lain Thoha yang menyatakan. Persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman (Mirfta Thoha, 1986: 138). Senada dengan Thoha, Rakhmat memberikan pengertian persepsi sebagai ".... pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Jalaluddin Rakhmat, 1986 : 64).

Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi. Persepsi sosial adalah berhubungan secara langsung dengan bagaimana seseorang individu melihat dan memahami orang lain. Karyawan-karyawan suatu departemen secara ajeg akan terlihat dalam proses persepsi ini dalam hal mereka mengenal, melihat, memahami dan menilai satu sama lainnya. (Mirfta Thoha, 1986 : 137-139)

2. Keberadaan BPR

Bank merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam bidang jasa. Menurut Bulitin OHP (1991: 9-10) Bank memiliki perangkat keras (Hardddware), Lunak (software) dan Otak (Brainware). Dimanakah Bank beroperasi yaitu dapat pada Internasional, Nasional dan Regional. Pada bagian Regional/wilayah antara lain Asia (ADB), Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa (rural). Untuk keberadaan Bank di Pedesaan harus mendapat dukungan dan sokongan dari masyarakat sekitarnya. Bank Perkreditan rakyat yang telah mulai beroperasi sejak tahun 1989 di Sumatera Barat tumbuh dan berkembang dengan pesatnya. Untuk mengetahui hal ini keberadaan BPR di Pedesaan sangat dipengaruhi oleh masyarakat antara lain Pemuka masyarakat dan Ninik Mamak serta Alim Ulama dan Cerdik pandai di kenegarian. Sasaran dari Bank harus memperoleh pendapatan yang mampu memikul; biaya operasional, biaya personil, biaya overhead (material dan sarana), dan hendaknya masih bersisa untuk yang lain.

Sebelum BRI masuk Desa masyarakat pedesaan dulunya dikuasai oleh pialang pelepas utang, yang mana pinjaman uang yang dilakukan seseorang dengan tingkat pengembalian bunga yang sesuka hati para rentenir. Akhirnya banyak terjadi pelelangan cengkeh, padi dan lain-lain yang belum pantas untuk dipanenkan, (dikenal sistem Ijon).

Untuk itu masyarakat desa sering mendapat hambatan dalam menjalankan usaha terutama untuk mendapatkan

pinjaman kredit dalam memenuhi modal kerja. Modal kerja yang diperoleh dulunya melalui BRI unit Desa yang ada di pedesaan. Hal ini juga mendapat hambatan karena untuk mendapatkan modal itu harus menyerahkan agunan berupa STNK motor, sertifikat tanah dan sebagainya. Dengan adanya perhatian dari pemerintah diberikanlah sejenis pinjaman lunak melalui LPN (Lumbung Pitih Nagari) kalau di kenegarian dan sebagainya. Dengan adanya perhatian dari pemerintah dan warga masyarakat yang disponsori GEBU Minang berdirilah 7 buah BPR di Sumatera Barat dan perkembangan LPN yang berubah menjadi BPR. Akhirnya BPR di Sumatera Barat telah tumbuh di setiap kabupaten bahkan kecamatan serta pedesaan.

3. Pembangunan Pedesaan

Esmara (1982:381), mengemukakan bahwa usaha-usaha untuk mengukur perkembangan pembangunan suatu negara dimulai dengan mempergunakan konsep indikator ekonomi. Kemudian disadari bahwa ukuran-ukuran ini tidak mampu memperlihatkan perkembangan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sehingga timbul gagasan untuk memonitor kehidupan masyarakat melalui konsep indikator sosial. Namun demikian kedua indikator itu secara terpisah-pisah memperlihatkan peranan yang tidak begitu berarti, sehingga ditampilkannya indikator sosial ekonomi, seperti dalam pemberian kredit oleh BPR pada masyarakat. Keberadaan BPR diharapkan dapat mendorong pembangunan pedesaan.

Selanjutnya Esmara (1982 : 382) mengemukakan bahwa mengenai proses pembangunan Indonesia, telah dirumuskan suatu indikator sosial oleh tim perumus penyempurnaan indikator sosial yang dibentuk oleh Menteri Negara Kesehatan Rakyat RI dalam tahun 1974. Gambaran sosial masyarakat dijemakan dalam bentuk sepuluh komponen.

- Kependudukan, termasuk KB dan Transmigrasi
- Kesehatan
- G i z i
- Tenaga Kerja dan Koperasi
- Pendidikan dan Kebudayaan
- Kesejahteraan sosial
- Lingkungan fisik dan perumahan
- Keamanan dan Ketertiban masyarakat
- A g a m a
- U m u m

Jadi indikator sosial adalah merupakan suatu ukuran yang mampu menjelmakan kebijaksanaan pembangunan pedesaan Indonesia baik di masa lampau maupun di masa yang akan datang dalam suatu bentuk yang sistimatis dan mudah dimengerti.

Pembangunan pedesaan ini dapat dijalankan dengan bermacam kegiatan dan aktivitasnya, salah satu dengan mendirikan bank-bank dipedesaan. Kehadiran bank dipedesaan akan banyak dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakatnya. Masyarakat pegawai dapat memberikan persepsi yang baik bila dibandingkan dengan swasta. Menurut Maryunas (Haluan, 16 Sept. 1993 : 7) mengatakan Alim

Ulama dan Ninik Mamak mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

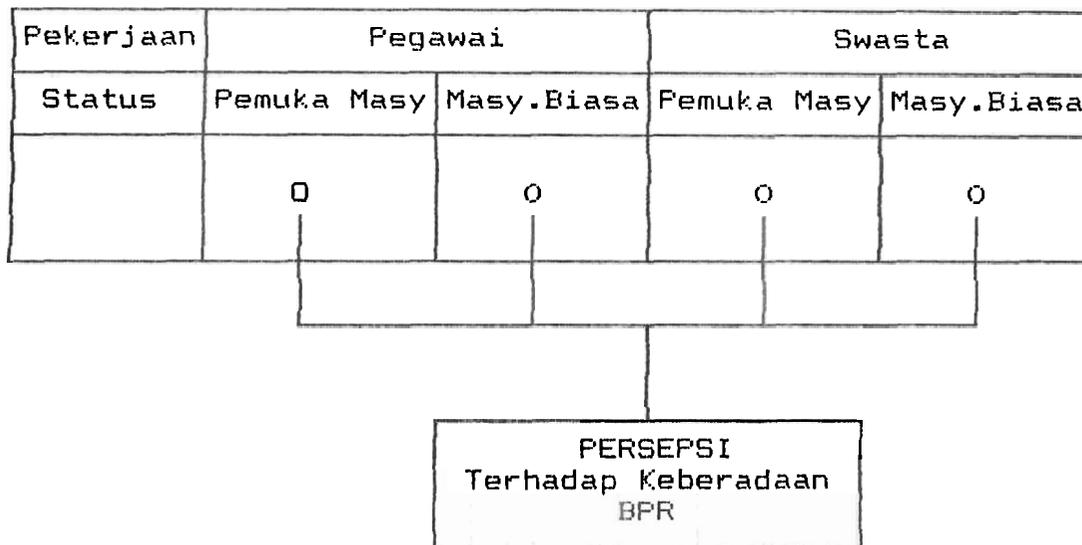
Dalam penelitian ini perlu dibedakan istilah kekuasaan (power) dan pengaruh (influence) dengan wewenang. Hal ini disebabkan karena istilah wewenang, kekuasaan dan pengaruh sering dipertukarkan. Suharsimi Arikunto menjelaskan dengan mengartikan pengaruh "..... sesuatu aksi yang menimbulkan reaksi atau yang mengakibatkan sesuatu, sedangkan kekuasaan diartikan "..... kemampuan aktor untuk mempengaruhi aktor lain agar dapat dibawah kearah yang ia berikan atau usul yang ia kemukakan (Suharsimi : 1988 : 24-25).

B. Kerangka Berpikir

Latar belakang status pekerjaan dan peranan masyarakat di tengah-tengah kehidupan perkembangan Bank dimana masyarakat pegawai dengan masyarakat swasta akan dapat memberikan persepsi keberadaan BPR di pedesaan. Selanjutnya status masyarakat seperti pemuka masyarakat dengan masyarakat biasa akan berpersepsi pula tentang keberadaan BPR di Pedesaan. Pemuka masyarakat yang dimaksud adalah Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai dalam Nagari diduga akan memberi pengaruh terhadap keberadaan Bank di desa.

Untuk lebih jelasnya diberikan gambaran kerangka berpikir untuk menyatukan pandangan di bawah ini.

Kerangka berpikirnya adalah sebagai berikut :



C. Perumusan Hipotesis

1. Terdapat perbedaan persepsi yang berarti positif terhadap keberadaan BPR antara masyarakat pegawai dengan masyarakat swasta, di Kabupaten Tanah Datar.
2. Terdapat perbedaan persepsi yang berarti positif antara Pemuka masyarakat dengan Masyarakat Biasa, di Kabupaten Tanah Datar.
3. Terdapat interaksi antara pekerjaan masyarakat dengan status dalam masyarakat pada studi kasus terhadap keberadaan BPR di Kabupaten Tanah Datar.

C. Asumsi

Untuk menyatukan pendapat dalam penelitian ini, peneliti berasumsi sebagai berikut:

1. Masyarakat akan memberikan jawaban dengan jujur.
2. Keberadaan BPR/LPN telah diketahui oleh responden.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut maka dalam penelitian ini dibagi dua variabel yaitu (1) Variabel tentang persepsi masyarakat pegawai terhadap keberadaan BPR/LPN dan persepsi masyarakat swasta terhadap keberadaan BPR/LPN. (2) Variabel Interaksi antara pekerjaannya dengan status sosial di masyarakat.

A. Sistem Pendekatan dan Areal Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tanah Datar dengan subjek penelitian adalah masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar BPR di pedesaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan deskriptif kuantitatif dengan formula statistik. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 1993 sampai dengan bulan Januari 1994.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Generalisasi dari penelitian ini adalah daerah tingkat II Kabupaten Tanah Datar yang memiliki sembilan BPR/LPN. Jadi yang menjadi unit populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di sekitar daerah kerja BPR/LPN.

2. Sampel

Populasi dikelompokkan menjadi dua, berdasarkan kategori jenis pekerjaan yaitu pegawai dan swasta. Masing-masing kelompok diklasifikasikan lagi menjadi pemuka masyarakat dan masyarakat biasa. Berdasar klasifikasi tersebut diambil sampel secara acak masing-masing kelompok terdiri dari 27 responden.

Dengan demikian jumlah sampel sebanyak 108 orang seperti tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 1 : Klasifikasi dari sampel penelitian.

MASYARAKAT PEGAWAI		MASYARAKAT SWASTA	
PEMUKA MASYARAKAT	MASYARAKAT BIASA	PEMUKA MASYARAKAT	MASYARAKAT BIASA
27 orang	27 orang	27 orang	27 orang

C. Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Data mengenai persepsi/pendapat tentang keberadaan BPR di daerah pedesaan yang informasinya di peroleh dari masyarakat pegawai dan pemuka masyarakat. Metode pengumpulan data dilaksanakan dengan metode kuesioner dengan mempergunakan angket. Selanjunya ditambah dengan informasi mengenai mamfaat yang dirasakan oleh nasabah BPR. Dengan demikian metode pengumpulan data adalah metode observasi pengamatan dilapangan.

Berikut ini dikemukakan deskripsi dan ukuran dari masing-masing variabel. Untuk mengukur persepsi, pendapat seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial digunakan Skala Likert (Sugiyono : 1992 : 67). Dalam penelitian ini pernyataan dan pertanyaan terdiri dari 17 buah, yang mana pernyataan dan pertanyaan positif akan dinilai untuk sangat setuju 4, setuju 3, dan tidak setuju 2 serta sangat tidak setuju adalah 1, sedangkan untuk pernyataan dan pertanyaan yang negatif adalah sebaliknya.

D. Analisis Data

Semua informasi yang telah terkumpul diolah dengan formula statistik dengan rumus ANOVA (Analisis of Variance). Sebelum data dianalisis dilakukan deskripsi data.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data.

Data mentah penelitian ini diperoleh dari Responden dengan karakteristik seperti yang telah dikemukakan dalam penarikan sampel di atas. Secara umum data mengenai persepsi terhadap keberadaan BPR/LPN ini diukur dengan mamfaat, inovasi pembangunan dan perubahan prilaku yang dirasakan oleh masyarakat. Untuk gambaran deskriptif yang diperoleh dari hasil penelitian yakni masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Persepsi Pegawai yang berstatus Pemuka Masyarakat.

Data megenai persepsi masyarakat pegawai yang berstatus pemuka masyarakat terhadap keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di pedesaan dalam hal ini, dari 27 responden diperoleh nilai terendah 51 dan tertinggi 68 rata-rata 63,333 serta standar deviasi 4,038. (Lihat lampiran 3).

2. Persepsi Pegawai yang berstatus Masyarakat Biasa.

Data megenai persepsi masyarakat pegawai yang berstatus masyarakat biasa terhadap keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di pedesaan dalam hal ini, dari 27 responden diperoleh nilai terendah 55 dan tertinggi 68 rata-rata 63,593 serta standar deviasi 4,153. (Lihat lampiran 3).

3. Persepsi Swasta yang berstatus Pemuka Masyarakat.

Data mengenai persepsi masyarakat swasta yang berstatus pemuka masyarakat terhadap keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di pedesaan dalam hal ini, dari 27 responden diperoleh nilai terendah 47 dan tertinggi 66 rata-rata 55,704 serta standar deviasi 5,539. (Lihat lampiran 3).

4. Persepsi Swasta yang berstatus Masyarakat Biasa.

Data mengenai persepsi masyarakat pegawai yang berstatus masyarakat biasa terhadap keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di pedesaan dalam hal ini, dari 27 responden diperoleh nilai terendah 50 dan tertinggi 68 rata-rata 61,593 serta standar deviasi 4,846. (Lihat lampiran 3).

B. Pengujian Hipotesis.

Setelah diketahui kecendrungan data yang terjadi pada setiap variabel seperti dikemukakan pada bagian deskripsi data terdahulu, maka salah satu hasil penelitian ini yang lebih penting adalah pengujian hipotesis. Untuk itu dalam penelitian ini ada terdapat tiga hipotesis penelitian yang diajukan dan akan dibuktikan kebenarannya dengan pengolahan data melalui teknik analisis ANOVA (Analisis Of Variance) dua arah atau Two-Way-Anova. Hipotesis yang dimaksud sebagai berikut:

1. Terdapatnya perbedaan persepsi yang berarti positif terhadap keberadaan BPR/LPN antara masyarakat pegawai dengan masyarakat swasta di Kabupaten Tanah Datar. Perbedaan persepsi antara masyarakat pegawai dengan masyarakat swasta berdasarkan analisis Two-Way Anova diperoleh dari 108 responden ; masyarakat pegawai mempunyai nilai rata-rata 63,463 dan masyarakat swasta memiliki rata-rata 58,648 serta dengan Grand Mean 61,056. Berdasarkan perhitungan analisis variance hitung diperoleh harga F-Ratio 28,543 (lihat lampiran No. 3).

Dalam pembuktian kebenaran hipotesis dengan hasil pengolahan data tersebut, maka hasil analisis data dibandingkan dengan harga tabel F-Ratio untuk signifikan $0,05$ adalah 6,90.

Berdasarkan hasil perbandingan harga F-Ratio hitung dengan F-Ratio tabel ternyata harga F-Ratio hitung jauh melebihi harga F-Ratio tabel. Oleh karena itu dalam pembuktian hipotesis penelitian ini dengan taraf kepercayaan 95% dapat dikatakan "Terdapat perbedaan yang berarti antara persepsi masyarakat pegawai dengan masyarakat swasta terhadap keberadaan Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tanah Datar dapat diterima."

2. Terdapatnya perbedaan persepsi yang berarti positif antara Pemuka masyarakat dengan Masyarakat Biasa di Kabupaten tanah Datar.

Perbedaan persepsi antara Pemuka Masyarakat dengan Masyarakat Biasa berdasarkan analisis Two-Way Anova diperoleh dari 108 responden ; Pemuka Masyarakat mempunyai nilai rata-rata 59,519 dan Masyarakat Biasa memiliki rata-rata 62,593 serta dengan Grand Mean 61,056. Sedangkan berdasarkan perhitungan analisis variance hitung diperoleh harga F-Ratio 11,635 (lihat lampiran No. 3).

Dalam pembuktian kebenaran hipotesis dengan hasil pengolahan data tersebut, maka hasil analisis data dibandingkan dengan harga tabel F-Ratio untuk signifikan α 0,05 adalah 6,90.

Berdasarkan hasil perbandingan harga F-Ratio hitung dengan F-Ratio tabel ternyata harga F-Ratio hitung lebih besar dari harga F-Ratio tabel. Oleh karena itu dalam pembuktian hipotesis penelitian ini dengan taraf kepercayaan 95% dapat dikatakan "Terdapat perbedaan yang berarti positif antara persepsi Pemuka Masyarakat dengan Masyarakat Biasa terhadap keberadaan Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tanah Datar dapat diterima.

3. Terdapat interaksi antara pekerjaan masyarakat dengan status kedudukannya dalam masyarakat pada studi kasus terhadap keberadaan Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tanah Datar.

Interaksi antara pekerjaan dengan status kedudukan ditengah-tengah masyarakat berdasarkan analisis Two-Way Anova dari 108 responden yang terdiri dari pegawai yang berstatus pemuka masyarakat mempunyai rata-rata 63,333, pegawai yang berstatus masyarakat biasa mempunyai rata-rata 63,593, dan swasta yang berstatus pemuka masyarakat mempunyai rata-rata 55,704 serta swasta yang masyarakat biasa atau anggota masyarakat mempunyai rata-rata 61,593 diperoleh Grand Mean 61,056. Berdasarkan perhitungan analisis varian interaksi F-Ratio 9,755 (Lihat lapiran No. 3).

Dalam pembuktian kebenaran hipotesis dengan hasil pengolahan data tersebut, maka hasil analisis data dibandingkan dengan harga F-Ratio tabel untuk signifikan α 0,05 adalah 6,90. Berdasarkan perbandingan hasil F-Ratio hitung dengan F-Ratio tabel ternyata interaksi harga F-Ratio hitung besar dari F-Ratio tabel.

Dengan demikian terdapat interaksi antara pekerjaan dengan status kedudukannya di masyarakat pada studi kasus terhadap keberadaan Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tanah Datar dapat diterima.

C. Pembahasan

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui dan mengkaji apakah ada perbedaan persepsi masyarakat tersebut terhadap keberadaan BPR/LPN di Pedesaan Kabupaten Tanah Datar.

Dalam analisis umum pada studi ini sesuai dengan beberapa variabel yang diselidiki serta hal-hal yang penting ditemui sebagai berikut :

Pertama : Secara agregatif masyarakat pegawai di Kabupaten Tanah Datar memberikan persepsi, pandangan yang sangat baik terhadap keberadaan BPR di Pedesaan. Masyarakat pegawai dapat sebagai motivator, inovasi, dan penyalur program pemerintah kemasyarakatan desa. Masyarakat pegawai yang ada di desa dalam hal ini merupakan orang yang terpendang. Di samping itu masyarakat pegawai ini dapat menyalurkan program-program pemerintah kepada masyarakat. Sehingga masyarakat pegawai juga akan berpengaruh terhadap keberadaan BPR di desa.

Kedua : Status kedudukan masyarakat tanpaknya sangat berpengaruh terhadap keberadaan Bank BPR di Pedesaan. Di Ranah Minangkabau peran tungku tigo sejarangan (Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai dalam Nagari) sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan bank di pedesaan. Hal ini didukung oleh pendapat Camat Sungai Laimau Drs. Maryunas Mahyudin mengatakan Alim Ulama dan Ninik Mamak mempunyai pengaruh yang besar dalam upaya peningkatan pendapat daerah. Keberadaan Ninik Mamak dan Alim Ulama ini ditengah-tengah masyarakat merupakan "**Lanter**a" petunjuk jalan bagi masyarakat (Haluan, 16 September 1993: 7).

Selanjutnya didukung lagi dari hasil penelitian yang diamati dilapangan bahwa, untuk mendapatkan kredit pinjaman dari BPR/LPN harus ada jaminan. Jaminan yang terba-

nyak digunakan BPR/LPN adalah surat keterangan dari Kepala Desa. Hanya sebagian kecil masyarakat yang menggunakan borognya sertifikat tanah, STNK mobil maupun STNK sepeda motor.

Untuk mendapatkan surat keterangan dari Kepala Desa harus melalui tingkat-tingkat sebelumnya, yaitu calon nasabah kredit harus meminta ijin dulu kepada kepala dusun atau Ninik Mamak mereka. Setelah ada rekomendasi dari kepala dusun atau Ninik Mamak mereka tersebut barulah Kepala Desa bisa membuat surat keterangan yang dimaksud.

Dalam hal ini tampaklah jelas, bahwa peranan tungku tigo sejarangan ini ditengah-tengah masyarakat Minangkabau sangat berpengaruh. Kalau tidak diberi ijin dari Ninik Mamak mereka, pasti kepala desa tidak akan memberikan surat keterangan. Apalagi sebagian Ninik Mamak dan Alim Ulama memandang riba tentang bunga uang bank ini.

Perkembangan BPR/LPN di Pedesaan sangat mengembirakan kita. Namun perkembangan tersebut tidak merata di Kabupaten Tanah Datar, ada yang memiliki BPR/LPN dua buah setiap Nagari dan ada sama sekali tidak ada. Di samping itu tingkat persaingan tidak sehat, karena saling berlomba mencari nasabah. Menurut Gubernur Bank Indonesia Soegradjat Djiwandono kemukakan; BI akan menertibkan BPR/BKD (Haluan, 17 September 1993 : 7).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan yang terdapat pada hasil penelitian dan pembahasan di muka, maka pada bagian ini dikemukakan kesimpulan penelitian yang meliputi tentang :

1. Hasil Deskripsi Data.

a. Persepsi Pegawai yang berstatus Pemuka Masyarakat.

Kecenderungan pegawai yang berstatus pemuka masyarakat memberikan persepsi terhadap keberadaan Bank Perkreditan Rakyat di Pedesaan dalam penelitian ini menunjukkan sangat setuju. Hal ini diakibatkan karena manfaat dan kegunaan bank yang telah dirasakannya.

b. Persepsi Pegawai yang berstatus Masyarakat Biasa.

Persepsi masyarakat pegawai yang berstatus masyarakat biasa di Kabupaten Tanah Datar yang mana sebagian besar menyatakan setuju dan menyokong atas keberadaan BPR/LPN.

c. Persepsi Swasta yang berstatus Pemuka Masyarakat.

Keberadaan BPR/LPN di Pedesaan menurut persepsi swasta yang berstatus Pemuka Masyarakat dari hasil penelitian ini, menyatakan agak ragu-ragu. Hal ini mungkin diakibatkan masih ada sebagian alim ulam kita yang memandang bunga uang bank dianggap riba.

d. Persepsi Swasta yang berstatus Masyarakat Biasa.

Sedangkan menurut persepsi swasta yang berstatus Masyarakat biasa juga memberikan persepsi yang mendukung atau setuju atas keberadaan BPR/LPN di pedesaan.

2. Uji Hipotesis.

- a. Terdapat Perbedaan persepsi yang berarti positif terhadap keberadaan BPR/LPN antara masyarakat pegawai dengan masyarakat swasta di Kabupaten Tanah Datar, yang dapat di terima berdasarkan F-Ratio hitung 28,543 besar dari harga F-Ratio Tabel $0,05$ sebesar 6,90.
- b. Terdapat perbedaan persepsi yang berarti positif terhadap keberadaan BPR/LPN antara pemuka masyarakat dengan masyarakat biasa di Kabupaten Tanah Datar yang dapat diterima berdasarkan F-Ratio hitung 11,635 besar dari harga F-Ratio tabel $0,05$ sebesar 6,90.
- c. Terdapat interaksi antara pekerjaan masyarakat dengan status dalam masyarakat pada studi kasus terhadap keberadaan BPR/LPN di Kabupaten Tanah Datar yang diterima berdasarkan F-Ratio hitung 9,755 besar dari F-Ratio tabel dengan signifikan $0,05$ sebesar 6,90.

Selanjutnya sistem ijon dan rentenir yang merugikan masyarakat bisa teratasi. Adanya BPR/LPN di desa akan bisa membuat rakyat hidup hemat dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan, justru akan dapat sebagai pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan. Miskinnya masyarakat bukan

hanya disebabkan kurangnya harta, tetapi karena banyak jam-jam kerja yang terbuang setiap hari diwarung-warung begitu saja. Karena lahan yang akan digarap ada, tetapi kekurangan modal. Dengan adanya BPR/LPN sebagai penupang dan pemberi modal untuk hal tersebut, maka jam-jam kerja yang terbuang diwarung-warung oleh masyarakat akan tidak ditemui lagi.

B. Saran Penelitian.

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang dikemukakan terdahulu dapat disarankan pada penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan fungsi dan peranan Bank di Pedesaan agar mempunyai makna dan bermanfaat bagi Pembangunan Masyarakat pedesaan, maka hendaknya BPR/LPN memberikan pelayanan (service) pada nasabah atau masyarakat desa yang sebaik-baiknya, sehingga kehadiran BPR/LPN di pedesaan itu betul-betul mempunyai manfaat banyak pada masyarakat tersebut. BPR/LPN harus bekerjasama dengan KUD/BUUD dan sesama BPR/LPN serta dengan Pemuka Masyarakat daerah kerja.
- b. Masyarakat di Tanah Datar telah menerima inovasi dan modernisasi serta perubahan perilaku. Karena itu peranan Bank telah dirasakan manfaatnya baik oleh petani, pedagang, industri kecil dan lain-lain. Saran peneliti agar pemuka masyarakat dapat memberikan pengertian pada anak kemenakan keuntungan BPR/LPN di bandingkan dengan rentenir yang sangat merugikan masyarakat pedesaan.

DAFTAR BACAAN

- Arikunto, Suharsimi, (1988), Organisasi dan administrasi pendidikan teknologi dan kejuruan, Jakarta : Depdikbud Dirjendikti., P2LPTK.
- Azmar, Asril, (1990), Ringkasan sistem Akuntansi BPR, Padang : Bahan pengajaran pada training BPR LPN.
- Barek samo dipikuh ringan samo dijinjang, (1986), Jakarta : Gebu Minang.
- Dharma, Agus, (1989), Manajemen perilaku organisasi, Jakarta: pendencygunaan sumber daya manusia, .
- Faisal, Sanapian, (1981), Dasar-dasar dan teknik menyusun anket Surabaya : Penerbit Usaha Nasional.
- N, (1993), Jakarta: Penerbit Pustaka Indonesia,
- Gerakan seribu minang adalah gerakan kebudayaan, (1989), Jakarta : Gebu Minang.
- Lexy J. Moleong, (1991), Metode penelitian kualitatif, Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya, .
- Lipsey G., Richard, (1984), Pengantar ilmu ekonomi, Jakarta : Bina Aksara.
- Majalah serunai, (1993), Jakarta : Gebu Minang.
- Nazir, Mohd, (1988), Metode penelitian, Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nadir, Gozari, (1991), Pengawasan kredit, Padang : Bank Pembangunan Daerah.
- Pengantar analisa kredit, (1990), Padang : Pengelola Bank Perkreditan Rakyat.
- Rahkmat, Jalaluddin, (1986), Psikologi komunikasi, Bandung : Remaja Karya.
- Ritonga, Abdulrahman (1987), Statistik terapan untuk penelitian, Jakarta : Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UI.
- Strategi gerakan seribu minang, (1987), Jakarta : Gebu Minang.
- Simanjuntak, (1986), Ekonomi pertanian, Bandung : Ganesa.
- Sugiyono, (1992), Metode penelitian administrasi, Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Thoha, Mirfta, MPA. (1986), Perilaku organisasi sosial, Jakarta : Konsep dasar dan aplikasinya, Rajawali.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG
PUSAT PENELITIAN

Gedung Rektorat IKIP Padang
Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang Kode Pos: 25131
Telepon: 51260 Pesawat: 213-217

Nomor : 622/PT 37 H9/N-4.1.4/1993 27 September 1993
Lamp. :
Hal : Mohon izin untuk mengumpulkan data penelitian

Kepada: *Bapak Gubernur KDH Tk. I Sumbar
u.p. Kepala Direktorat Sosial Politik
Provinsi Sumatera Barat
Padang*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Dekan FPIPS IKIP Padang tanggal 17 September 1993 Nomor: 1671/PT 37. H4.FPIPS/N/1993 yang isinya seperti pokok surat ini, maka dengan ini kami mohon agar Bapak sudi memberi izin kepada Dosen IKIP Padang:

*N a m a : Drs. Zul Azhar
N I P : 131466560
Jur./Fak. : PDU/FPIPS IKIP Padang*

untuk mengumpulkan data penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan:

*J u d u l : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBERADAAN BANK
PERKEREDITAN RAKYAT (BPR) STUDI KASUS DI
KABUPATEN TANAH DATAR.*

Lokasi : Kab. Tanah Datar.

Waktu : 27 September s.d. 31 Desember 1993.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami sampaikan terima kasih.



Kepala,

*Dr. Zainil, M.A.
NIP. 130187088*

Tembusan Yth. :

1. Bapak Rektor IKIP Padang
2. Dekan FPIPS IKIP Padang
3. Bupati KDH Tk. II Kab. Tanah Datar
4. Pimpinan BPR;
5. Ketua Jurusan PDU/FPIPS IKIP Padang
6. Peneliti ybs.

"SURAT KETERANGAN / REKOMENDASI"

Nomor : 070/519 / Sospol /K - 1993

Kami Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanah Datar, setelah mempelajari dan memperhatikan surat : Gubernur Kepala Daerah TK.I Sumatera Barat Cq.Dit Sospol Nomor : B.070 2204/Sospol/K - 1993 tanggal 15 Oktober 1993.

Dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud untuk mengadakan penelitian di Daerah Tingkat II Tanah Datar, yang dilakukan oleh :

Nama : Drs. Zul Azhar
 Tempat / tanggal lahir : Pagaruyung Tanah Datar 5 - 8 - 1959
 Pekerjaan : Dosen IKIP Padang
 Alamat : Desa Gudam Pagaruyung Batusangkar
 Kartu Identitas : KTP.0132.1011.11.71.93
 Maksud dan obyek penelitian : Dengan Judul Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) di Pedesaan Dengan ... Masyarakat Di Kab.Tanah Datar

Lokasi penelitian : BPR se Kabupaten Tanah Datar

Waktu penelitian : 27 September s/d 31 Desember 1993

Anggota peneliti : Des Idris , Drs Hasdi Ainun

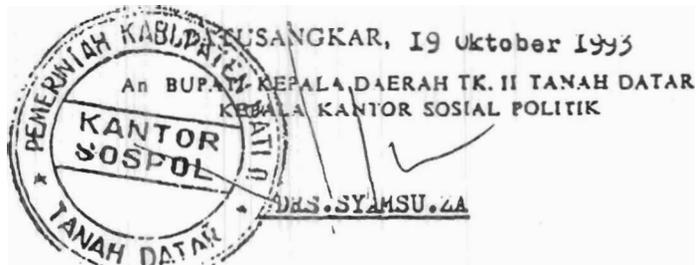
Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka penelitian sebagaimana tersebut diatas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Bila terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka surat keterangan / rekomendasi ini akan DICABUT kembali.
5. Surat keterangan / rekomendasi ini diberikan / berlaku mulai tanggal 27 September sampai tanggal 31 Desember 1993

Kepada yang bersangkutan :

Tembusan : Yth Sdr.

1. Kapolres Tanah Datar di Batusangkar
2. Dan Dim 0307 T. Datar di Batusangkar.
3. Kepala Pusat Penelitian IKIP Padang
4. Semua BPR se Kab.Tanah Datar
5. Camat se Kabupaten Tanah Datar
6. A r s i p .



LAMPIRAN 2.

INSTRUMEN UNTUK PEGAWAI DAN SWASTA

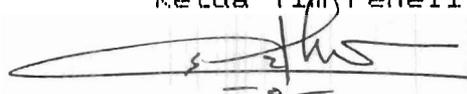
Yth. Bapak/Ibuk, Ninik Mamak, Alim Ulama dan cerdik Pandai
yang kami hormati

Dengan segala hormat, sehubungan dengan angket yang kami berikan pada Bapak/Ibuk untuk mohon diisi sejujurnya. Angket ini untuk studi/penelitian semata-mata untuk ilmiah di Perguruan Tinggi dalam rangka melihat keberadaan Bank BPR di Pedesaan.

Akhirnya atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibuk yang baik dengan kami, kami sampaikan terima kasih.

Padang, 27 September 1993

Ketua Tim Peneliti,



Drs. Zul Azhar
NIP. 131 466 560

Petunjuk Isian

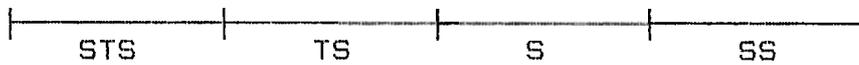
Setelah Bapak/Ibuk membaca Soal/Pernyataan dalam setiap nomor, terlebih dahulu betul-betul dipahami maksudnya, yang sesuai menurut pendapat Bapak/Ibuk yang sangat murni, tanpa dipengaruhi orang lain. Setelah itu mohon dilingkari nomor item jawaban yang telah tersedia.

|-----|-----|-----|-----|
STS TS S SS

Keterangan :

STS = Sangat Tidak Setuju
TS = Tidak Setuju
S = Setuju
SS = Sangat Setuju

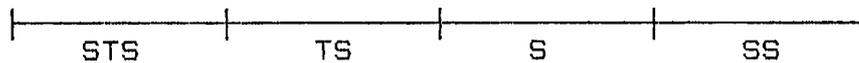
4. Salah satu tujuan Bank didirikan di Pedesaan adalah untuk menjadi penyalur program-program pemerintah ke masyarakat.



5. BPR sebagai lembaga komunikasi antar berbagai pihak dalam masyarakat.



6. Tujuan lain Bank didirikan di Pedesaan adalah mendidik dan mengajar masyarakat untuk hidup hemat.



7. Harapan Pemerintah agar masyarakat tidak menyimpan uang lagi di bawah bantal (di rumah).



8. BPR sebagai penampung aktivitas masyarakat Desa, sehingga keberadaannya di Desa.



9. Rentenir sudah lebih dulu keberadaannya daripada BPR di Desaini, untuk itu perlu dibina.



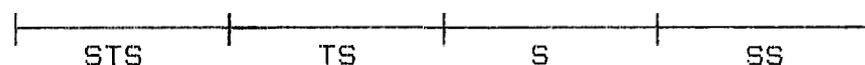
10. Sistem ijon yaitu menjual tanaman dalam keadaan berbunga dengan harga yang murah. Sistem ijon merugikan masyarakat yang berekonomi lemah.



11. BPR dapat mendidik dan membiasakan untuk menabung.



12. Bunga uang bank adalah riba.



13. Tujuan Bank di tempatkan di Pedesaan yaitu untuk dapat memberikan kredit pada pengusaha kecil/masyarakat pedesaan.



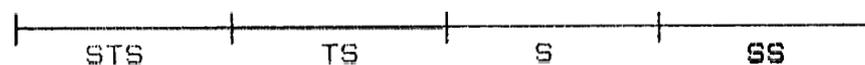
14. BPR/LPN dapat menggerakkan dan mendorong perubahan perilaku masyarakat Pedesaan.



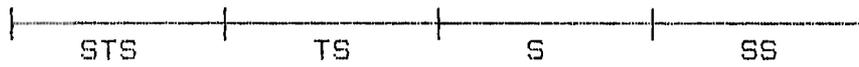
15. Masyarakat yang berekonomi lemah, banyak yang terbantu sejak adanya BPR/LPN ini.



16. BPR dapat memenuhi kebutuhan modal masyarakat pedesaan.



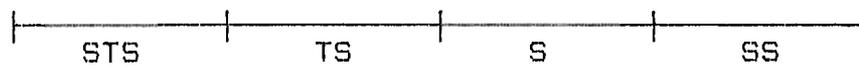
17. Pinjaman yang diperoleh dari BPR/LPN mendatangkan hasil.



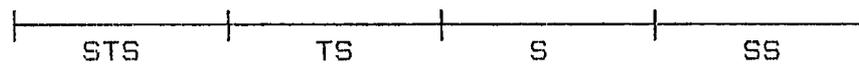
18. BPR/LPN ini tidak ada mamfaatnya bagi masyarakat Desa.



19. BPR/LPN dapat mendorong pembangunan masyarakat Pedesaan.



20. BPR/LPN ini perlu didirikan di Pedesaan.



*** Terima Kasih ***

----- DESCRIPTIVE STATISTICS -----

HEADER DATA FOR: B:DATA LABEL: DESKRIPSI DATA PENELITIAN BPR
 NUMBER OF CASES: 27 NUMBER OF VARIABLES: 4

DESKRIPSI DATA PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BPR

NO.	NAME	N	MEAN	STD. DEV.	MINIMUM	MAXIMUM
1	PG-PM	27	63.3333	4.0383	51.0000	68.0000
2	SW-PM	27	55.7037	5.5388	47.0000	66.0000
3	PG-MB	27	63.5926	4.1534	55.0000	68.0000
4	SW-MB	27	61.5926	4.8458	50.0000	68.0000

HEADER DATA FOR: B:DATA LABEL: DESKRIPSI DATA PENELITIAN BPR
 NUMBER OF CASES: 27 NUMBER OF VARIABLES: 4

	PG-PM	SW-PM	PG-MB	SW-MB
1	68.00	58.00	61.00	59.00
2	64.00	63.00	59.00	57.00
3	64.00	58.00	59.00	61.00
4	65.00	55.00	55.00	60.00
5	61.00	60.00	68.00	50.00
6	68.00	52.00	63.00	56.00
7	56.00	52.00	67.00	63.00
8	51.00	61.00	65.00	52.00
9	67.00	47.00	65.00	63.00
10	64.00	64.00	65.00	56.00
11	67.00	52.00	60.00	68.00
12	66.00	53.00	67.00	67.00
13	65.00	49.00	66.00	67.00
14	62.00	50.00	68.00	65.00
15	63.00	53.00	68.00	67.00
16	66.00	58.00	65.00	68.00
17	61.00	55.00	66.00	62.00
18	59.00	60.00	55.00	64.00
19	65.00	61.00	58.00	65.00
20	67.00	59.00	59.00	63.00
21	58.00	58.00	59.00	56.00
22	62.00	66.00	67.00	59.00
23	64.00	62.00	68.00	65.00
24	59.00	48.00	68.00	59.00
25	68.00	47.00	67.00	67.00
26	64.00	48.00	65.00	62.00
27	66.00	55.00	64.00	62.00

HEADER DATA FOR: B:BPR LABEL: INTRAKSI PEKERJAAN DENGAN STATUS
NUMBER OF CASES: 54 NUMBER OF VARIABLES: 2

	PEGAWAI	SWASTA
1	68.00	58.00
2	64.00	63.00
3	64.00	58.00
4	65.00	55.00
5	61.00	60.00
6	68.00	52.00
7	56.00	52.00
8	51.00	61.00
9	67.00	47.00
10	64.00	64.00
11	67.00	52.00
12	66.00	53.00
13	65.00	49.00
14	62.00	50.00
15	63.00	53.00
16	66.00	58.00
17	61.00	55.00
18	59.00	60.00
19	65.00	61.00
20	67.00	59.00
21	58.00	58.00
22	62.00	66.00
23	64.00	62.00
24	59.00	48.00
25	68.00	47.00
26	64.00	48.00
27	66.00	55.00
28	61.00	59.00
29	59.00	57.00
30	59.00	61.00
31	55.00	60.00
32	68.00	50.00
33	63.00	56.00
34	67.00	63.00
35	65.00	52.00
36	65.00	63.00
37	65.00	56.00
38	60.00	68.00
39	67.00	67.00
40	66.00	67.00
41	68.00	65.00
42	68.00	67.00
43	65.00	68.00
44	66.00	62.00
45	55.00	64.00
46	58.00	65.00
47	59.00	63.00
48	59.00	56.00
49	67.00	59.00
50	68.00	65.00
51	68.00	59.00
52	67.00	67.00
53	65.00	62.00
54	64.00	62.00

----- ANALYSIS OF VARIANCE -----

HEADER DATA FOR: B:BPR LABEL: INTRAKSI PEKERJAAN DENGAN STATUS
 NUMBER OF CASES: 54 NUMBER OF VARIABLES: 2

TWO-WAY ANOVA

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBERADAAN BPR

COL	MEAN	N
1	63.463	54
2	58.648	54

ROW	MEAN	N
1	59.519	54
2	62.593	54

CELL MEANS

ROW	COL	MEAN	N
1	1	63.333	27
2	1	63.593	27
1	2	55.704	27
2	2	61.593	27

GRAND MEAN	61.056	108
------------	--------	-----

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
COLS	625.926	1	625.926	28.543	5.435E-07
ROWS	255.148	1	255.148	11.635	9.228E-04
INTERACTION	213.926	1	213.926	9.755	2.317E-03
ERROR	2280.667	104	21.929		
TOTAL	3375.667	107			